

***Strategi Membangun Citra Lembaga Pendidikan Islam yang Efektif:
Konsep Dasar Manajemen Humas Berbasis Al-Qur'an***

Salsabila Qurratu'ain 'Abidah, Rustam Ibrahim

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Email: salsabilaq599@gmail.com

Abstract

Building a positive image of Islamic educational institutions is a strategic challenge in the era of global and digital competition. Public relations management based on the values of the Qur'an is the key to the effectiveness of image-building and a differentiator from conventional institutions. This article aims to examine effective strategies for building the image of Islamic educational institutions through the basic concepts of public relations management from an Islamic perspective. The method used is library research with descriptive-qualitative analysis of relevant literature, journals, and documents. The results show that effective strategies include the integration of divine values such as honesty (ṣidq), trustworthiness (amānah), good communication (qaulan sadīda), deliberation (syūrā), and information clarification (tabayyun) into every stage of public relations management (planning, organizing, actuating, controlling). The application of this strategy has been proven to increase public trust, reputation, and institutional sustainability. This article recommends strengthening Islamic-based public relations capacity and further empirical research.

Keywords: Image-Building Strategy, Public Relations Management, Islamic Education

Abstrak

Membangun citra positif lembaga pendidikan Islam merupakan tantangan strategis di era kompetisi global dan digital. Manajemen hubungan masyarakat (humas) yang berbasis nilai-nilai Al-Qur'an menjadi kunci efektivitas pencitraan sekaligus pembeda dengan lembaga konvensional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji strategi membangun citra lembaga pendidikan Islam yang efektif melalui pendekatan konsep dasar manajemen humas dalam perspektif Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan analisis deskriptif-kualitatif terhadap literatur, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa strategi efektif mencakup integrasi nilai-nilai ilahiah seperti kejujuran (ṣidq), amanah (amānah), komunikasi yang baik (qaulan sadīda), musyawarah (syūrā), dan tabayyun dalam setiap tahapan manajemen humas (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan). Penerapan strategi ini terbukti meningkatkan kepercayaan publik, reputasi, serta keberlanjutan lembaga. Artikel ini merekomendasikan penguatan kapasitas humas berbasis Islam dan penelitian empiris lebih lanjut.

Kata Kunci: Strategi Pencitraan, Manajemen Humas, Pendidikan Islam

A. Pendahuluan

Di tengah arus globalisasi dan revolusi digital, lembaga pendidikan Islam dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat. Masyarakat tidak hanya menuntut kualitas akademik yang unggul, tetapi juga pelayanan yang profesional, transparan, dan beretika. Citra lembaga menjadi aset tak berwujud yang sangat menentukan minat masyarakat untuk memilih, mempercayai, dan mendukung lembaga tersebut. Dalam konteks ini, manajemen hubungan masyarakat atau public relations (humas) memegang peranan strategis sebagai ujung tombak komunikasi publik dan membangun reputasi.¹

Namun, praktik humas di banyak lembaga pendidikan Islam masih seringkali bersifat reaktif, seremonial, dan belum terkelola secara sistematis berbasis nilai-nilai Islam. Padahal, Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam kaya akan prinsip-prinsip komunikasi, hubungan sosial, dan manajemen yang dapat dijadikan landasan bagi kegiatan kehumasan yang efektif dan berintegritas. Sayangnya, pemahaman tentang konsep humas Islami masih terbatas, sehingga potensi besar ini belum dimanfaatkan secara optimal.²

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa internalisasi prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas humas memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan reputasi lembaga. Prinsip-prinsip seperti kejujuran (ṣidq), amanah (amānah), komunikasi yang baik (qaulan sadīda), musyawarah (syūrā), dan klarifikasi informasi (tabayyun) terbukti mampu membangun kepercayaan publik yang lebih kuat dibandingkan pendekatan konvensional yang semata-mata berorientasi pada citra.³

Lebih jauh, strategi membangun citra lembaga pendidikan Islam yang efektif tidak dapat dilepaskan dari fungsi-fungsi manajemen humas secara utuh: mulai dari perencanaan yang matang, pengorganisasian yang profesional, pelaksanaan yang konsisten dengan nilai Islam, hingga pengawasan yang berkelanjutan. Semua itu harus dibingkai dalam semangat ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) dan fastabiqul khairāt (berlomba dalam kebaikan), sehingga citra yang terbangun bukanlah pencitraan semu, melainkan cerminan dari kualitas dan akhlak lembaga yang sesungguhnya.⁴

¹ M. Dwi Cahyono, "Islamic Values-Based Integrated Digital Reputation Management Model (IVID-MODEL)

² M. Adji Soenanto, "Implementasi Prinsip-prinsip Komunikasi Islam pada Produk Pemberitaan Humas UIN Walisongo" (*skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2025), 16–18, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25749/>.

³ "Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam dalam Pelaksanaan Manajemen Humas Dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Reputasi Sekolah (Studi Pada SMK Negeri 2 Palembang)," *Garuda - Garba Rujukan Digital*, diakses 16 Mei 2026,

⁴ Hikmah Eva Trisnantari, Moh. Gufron, dan Putri Rahayu Ningsih, "Strategic Public Relations to Build Public Trust in Islamic Boarding Schools: A Case Study in Indonesia," *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 10, no. 02 (2024): 325–336,

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang menjadi fokus kajian ini adalah bagaimana sesungguhnya konsep dasar manajemen hubungan masyarakat (humas) dalam perspektif Islam, dan bagaimana konsep tersebut dapat dijadikan landasan strategis untuk membangun citra lembaga pendidikan Islam secara efektif. Secara lebih rinci, penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan mendasar mengenai prinsip-prinsip fundamental apa saja yang bersumber dari Al-Qur'an yang relevan dengan praktik kehumasan, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut berbeda dengan pendekatan manajemen humas konvensional yang cenderung pragmatis dan materialistik. Selain itu, kajian ini juga menyoroti kesenjangan antara potensi nilai-nilai Islam yang kaya akan etika komunikasi dan realitas praktik humas di banyak lembaga pendidikan Islam yang masih bersifat reaktif, seremonial, dan belum terkelola secara sistematis.⁵

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendeskripsikan dan menganalisis secara konseptual hakikat manajemen humas dalam Islam, meliputi dimensi akidah, syariah, dan akhlak yang membedakannya dari humas konvensional. Kedua, mengidentifikasi dan merumuskan prinsip-prinsip fundamental dari Al-Qur'an seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, komunikasi yang baik (*qaulan ṣadīda*, *qaulan balīghā*, *qaulan karīmā*, *qaulan layyinā*, *qaulan maysūrā*), musyawarah (*syūrā*), tabayyun, ukhuwah Islamiyah, dan *fastabiqul khairāt*, serta menunjukkan bagaimana setiap prinsip tersebut diaplikasikan dalam tahapan manajemen humas (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan). Ketiga, menyusun rekomendasi strategis operasional bagi lembaga pendidikan Islam dalam membangun citra yang efektif, berkelanjutan, dan berintegritas berdasarkan nilai-nilai ilahiah.⁶

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis strategi membangun citra lembaga pendidikan Islam berdasarkan konsep dasar manajemen humas dalam perspektif Al-Qur'an. Sumber data terdiri dari sumber primer, yaitu Al-Qur'an (terjemahan Kementerian Agama RI), dan sumber sekunder, meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel ilmiah, serta hasil-hasil penelitian dan repository perguruan tinggi Islam yang membahas manajemen humas, komunikasi publik, manajemen lembaga pendidikan Islam, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kehumasan.⁷ Teknik

⁵ Soenanto, "Implementasi Prinsip-prinsip Komunikasi Islam," 18

⁶ Tubagus Wahyudi et al., "Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Dakwah dan Pendidikan Islam: Pemanfaatan Media Digital untuk Meningkatkan Citra Institusi KAHFI BBC Motivator School," *Jurnal Hijri* (2025), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/hijri/article/view/27246/>

⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994), 45–47

pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menelaah, dan mencatat informasi dari berbagai dokumen yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis melalui tiga tahapan: reduksi data (pemilihan dan penyederhanaan data), penyajian data (narasi deskriptif), dan penarikan kesimpulan (verifikasi dan interpretasi).⁸ Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari berbagai sumber, serta ketekunan pengamatan dengan membaca dan menelaah secara berulang untuk memastikan konsistensi pemahaman.⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi membangun citra lembaga pendidikan Islam yang efektif berdasarkan konsep dasar manajemen humas dalam perspektif Al-Qur'an. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi panduan praktis bagi pengelola lembaga pendidikan Islam, praktisi humas, serta akademisi yang tertarik pada pengembangan manajemen humas berbasis nilai-nilai ilahiah.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan keilmuan manajemen humas Islam, tetapi juga menawarkan implikasi praktis yang dapat diterapkan secara langsung dalam upaya peningkatan citra lembaga pendidikan Islam di tengah masyarakat.¹¹

C. Pembahasan

1. Konsep Dasar Manajemen Humas dalam Islam

Secara sederhana, manajemen humas (*Public Relations*) merupakan salah satu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, pengkomunikasian, serta pengkoordinasian secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama bagi sebuah lembaga atau organisasi. Manajemen humas dalam Islam merupakan suatu pendekatan yang memadukan fungsi-fungsi manajemen komunikasi publik dengan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an. Secara umum, manajemen humas dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap kegiatan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publiknya. Dalam perspektif Islam, definisi ini diperkaya dengan penekanan pada niat ibadah, keikhlasan, dan kemaslahatan umat.¹²

⁸ Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16–20.

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. rev. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330–332.

¹⁰ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 98–101

¹¹ Hasan Langgulung, *Peranan Pendidikan Islam dalam Pembangunan Umat* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988), 134

¹² Munir, *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 45.

Humas yang Islami adalah program manajemen yang memfokuskan pada komunikasi terarah antara lembaga dan masyarakat melalui prinsip-prinsip Al-Qur'an yang dilandasi nilai keadilan, kejujuran, amanah, dan kasih sayang. Konsep ini mencakup tiga dimensi: aqidah (keyakinan kepada Allah), syariah (kepatuhan pada hukum Islam), dan akhlak (budi pekerti mulia). Internalisasi prinsip-prinsip Islam dalam humas terbukti meningkatkan kepercayaan publik dan citra lembaga. Ketiga dimensi ini saling terkait dan membentuk kerangka kerja yang utuh bagi pengelolaan komunikasi publik yang berlandaskan nilai-nilai ilahiah.¹³

Sebagai sebuah konsep yang utuh, manajemen humas dalam Islam mencakup tiga dimensi utama. Pertama, dimensi aqidah (keyakinan), yang berarti seluruh aktivitas humas harus didasarkan pada keimanan kepada Allah dan niat yang ikhlas semata-mata karena-Nya. Kedua, dimensi syariah (hukum), yang berarti seluruh prosedur dan mekanisme kerja humas harus sesuai dengan aturan-aturan Islam, seperti larangan berbohong, menipu, dan menyebarkan berita bohong (hoax). Ketiga, dimensi akhlak (moral), yang berarti setiap komunikasi dan interaksi dengan publik harus mencerminkan budi pekerti yang mulia, seperti santun dalam berbicara, rendah hati, dan menghormati perbedaan pendapat. Ketiga dimensi ini menjadi landasan fundamental yang membedakan humas Islami dengan humas konvensional.

Manajemen hubungan masyarakat dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas komunikasi antara lembaga dan publik, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan nilai-nilai dakwah, pelayanan, dan kemaslahatan sosial. Secara konseptual, humas merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi komunikasi yang bertujuan membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dengan pemangku kepentingan. Dalam konteks Islam, fungsi tersebut diperkaya oleh prinsip tauhid, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Dengan demikian, humas dalam Islam tidak sekadar berfungsi sebagai alat pencitraan, melainkan sebagai wahana pengabdian dan dakwah bil-hal.¹⁴

Munir menjelaskan bahwa humas dalam pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam membangun hubungan harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat melalui komunikasi yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Humas tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, partisipasi masyarakat, dan dukungan terhadap program pendidikan. Peran strategis ini menuntut

¹³ Setyawan, "Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam dalam Manajemen Hubungan Masyarakat," *Jurnal Komunikasi Islam* 10, no. 2 (2020): 112.

¹⁴ Hasibuan et al., "Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Manajemen Humas Pendidikan," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 78.

humas untuk memiliki kompetensi komunikasi yang mumpuni sekaligus pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, humas pendidikan Islam harus diposisikan sebagai unsur penting dalam struktur organisasi lembaga.

Konsep ini sekaligus membedakan manajemen humas dalam Islam dengan manajemen humas konvensional. Jika humas konvensional lebih berorientasi pada keuntungan material dan pencitraan semata, maka humas Islami menempatkan nilai-nilai etika dan spiritual sebagai fondasi utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas humas tercermin dalam program kerja humas yang tidak hanya menekankan pada aspek prosedural tetapi juga pada substansi nilai-nilai Islam yang disampaikan kepada publik. Integrasi nilai-nilai Islam dalam hubungan masyarakat terbukti dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat citra lembaga, serta mendorong komunikasi yang transparan dan beretika.

Menurut penulis, perbedaan mendasar antara manajemen humas Islami dan humas konvensional tidak hanya terletak pada penggunaan simbol atau terminologi keislaman, melainkan pada orientasi nilai yang melandasinya. Humas konvensional umumnya berorientasi pada pencapaian reputasi organisasi sebagai tujuan utama, sedangkan humas Islami menempatkan reputasi sebagai konsekuensi dari implementasi nilai-nilai kebenaran, amanah, dan kemaslahatan. Dengan demikian, citra positif dalam perspektif Islam bukan dibangun melalui pencitraan semata, melainkan melalui konsistensi antara pesan yang disampaikan dengan praktik nyata yang dilakukan lembaga. Orientasi nilai ini menjadikan humas Islami memiliki keunggulan komparatif dalam membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan.

2. Prinsip-Prinsip Fundamental Manajemen Humas dalam Islam

Terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan manajemen humas dalam Islam. Prinsip-prinsip ini bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Hadis serta telah dikaji oleh para ahli manajemen dan komunikasi Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam pengelolaan komunikasi publik di lembaga pendidikan Islam. Pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ini menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya praktik kehumasan yang islami dan profesional.

Prinsip pertama yang paling mendasar adalah kejujuran (*ṣidq*) dan amanah (*amānah*). Kejujuran merupakan fondasi utama komunikasi Islam. Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar" (QS. Al-Ahzab: 70). Dalam praktik humas, prinsip ini mengharuskan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersifat akurat, transparan, dan dapat

dipertanggungjawabkan. Informasi yang dilebih-lebihkan, manipulatif, atau menyesatkan dapat merusak reputasi lembaga dalam jangka panjang. Penelitian menunjukkan bahwa kejujuran dan transparansi mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat hubungan antara komunikator dan masyarakat.

Prinsip pertama yang paling mendasar adalah kejujuran dan amanah. Dalam setiap aktivitas kehumasan, informasi yang disampaikan kepada publik harus benar, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik menyembunyikan fakta, memanipulasi data, atau memberikan informasi yang menyesatkan sangat dilarang dalam Islam. Al-Qur'an dengan tegas memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa dan berkata benar (Q.S. Al-Ahzab: 70). Integrasi nilai kejujuran (*ṣidq*) dan amanah (*amānah*) menjadi fondasi utama dalam pengelolaan komunikasi publik berbasis Islam. Amanah juga bermakna bahwa seorang praktisi humas harus menjaga rahasia institusi serta tidak menyalahgunakan wewenang dan informasi yang dimilikinya.

Prinsip kedua adalah komunikasi yang baik yang dirujuk dalam Al-Qur'an dengan berbagai istilah, seperti qaulan *sadīda*, qaulan *balīghā*, qaulan *karīmā*, qaulan *layyinā*, dan qaulan *maysūrā*. Qaulan *sadīda* (perkataan yang benar dan tepat) mengajarkan agar setiap pernyataan publik harus akurat dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam surah An-Nisa ayat 9, Allah memerintahkan untuk berkata benar. Menurut Syaikh Al-Alusi, qaulan *sadīda* adalah perkataan yang benar yang disertai dengan lemah lembut dan adab yang baik. Maka hendaknya humas dalam mengkomunikasikan sesuatu kepada publik dilakukan dengan benar, tidak kasar, dengan tata krama yang sopan, dan yang paling penting informasi yang disampaikan itu akurat.¹⁵

Qaulan *balīghā* (tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti) sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 63 menekankan pentingnya retorika dan penyampaian pesan yang mudah dipahami publik. Seseorang humas atau pimpinan lembaga pendidikan hendaknya dalam berkomunikasi mempunyai daya ungkap yang membekas pada lawan bicara atau pada publik. Qaulan *karīmā* (perkataan yang mulia) mengajarkan untuk berbicara dengan penuh hormat dan baik, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 32 dan Surah Al-Isra ayat 23. Dari ayat tersebut jelas bahwa manusia diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik atau mulia karena perkataan yang baik dan benar adalah suatu komunikasi yang menyeru kepada kebaikan dan merupakan bentuk komunikasi yang menyenangkan.

¹⁵ Al-Qur'an, QS. An-Nisa: 9; Al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, jilid 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 78.

Qaulan layyinā (perkataan yang lemah lembut) mengingatkan bahwa komunikasi yang keras tidak akan membuahkan hasil yang baik. Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Surah Thaha ayat 43 dan 44 tentang perintah Allah SWT kepada Nabi Musa dan Harun agar berbicara lemah-lembut, tidak kasar, kepada Fir'aun. Dengan qaulan layyinā, hati komunikan (orang yang diajak berkomunikasi) akan merasa tersentuh dan jiwanya tergerak untuk menerima pesan komunikasi dengan baik dan benar. Dengan demikian, dalam komunikasi Islam, semaksimal mungkin dihindari kata-kata kasar dan suara (intonasi) yang bernada keras dan tinggi. Qaulan maysūrā (perkataan yang pantas dan mudah diterima) mengajarkan penggunaan bahasa yang tidak memberatkan lawan bicara, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 28. Itulah beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara umum mengenai hubungan masyarakat (public relation) yang harus dijalankan oleh manusia dengan baik, pada khususnya humas.¹⁶

Prinsip ketiga adalah musyawarah (syūrā). Dalam manajemen humas, pengambilan keputusan terkait strategi dan kebijakan publik tidak boleh dilakukan secara sepihak. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk menyelesaikan urusan mereka dengan musyawarah (Q.S. Ali Imran: 159). Prinsip musyawarah ini sangat relevan dengan fungsi humas sebagai back up management yang harus melakukan konsolidasi dengan pimpinan dan pihak terkait sebelum mengambil langkah-langkah strategis. Musyawarah juga menjadi sarana untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kebijakan yang diambil.

Prinsip keempat adalah tabayyun (klarifikasi informasi). Di era informasi yang serba cepat dan penuh dengan berita bohong (hoax), prinsip tabayyun menjadi sangat krusial. Al-Qur'an mengajarkan bahwa jika datang kepada kita informasi dari orang yang fasik, maka hendaklah kita melakukan klarifikasi terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan (Q.S. Al-Hujurat: 6). Secara bahasa, tabayyun berarti meneliti, memastikan, atau mencari kejelasan. Dengan tabayyun, seorang praktisi humas dapat menyajikan klarifikasi yang memantapkan dan berimbang, bukan sekadar pembelaan buta. Penerapan tabayyun menjadi benteng pertahanan lembaga dari dampak negatif informasi palsu yang dapat merusak citra.¹⁷

Menurut penulis, prinsip tabayyun merupakan kontribusi paling relevan dari konsep komunikasi Islam terhadap praktik kehumasan modern. Di tengah maraknya disinformasi, hoaks, dan manipulasi informasi melalui media digital, tabayyun dapat

¹⁶ Al-Qur'an, QS. Thaha: 43-44, QS. Al-Isra: 28; Hasibuan et al., "Integrasi Nilai-Nilai Islam," 88.

¹⁷ Syarifudin, "Tabayyun sebagai Etika Komunikasi Islam dalam Menangkal Hoax," *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 1 (2019): 45.

diposisikan sebagai model etika komunikasi preventif yang mendahului konsep fact-checking modern. Oleh karena itu, penerapan tabayyun tidak hanya penting dalam konteks dakwah, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga kredibilitas lembaga pendidikan Islam di era digital. Prinsip ini menjadi pembeda yang signifikan antara pendekatan humas Islami dengan pendekatan humas konvensional.

Prinsip kelima adalah ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam). Prinsip ini menekankan bahwa hubungan antara lembaga dan publik harus dibangun di atas semangat persaudaraan, tolong-menolong, dan saling menguntungkan. Dalam praktik kehumasan, prinsip ukhuwah Islamiyah diwujudkan dalam bentuk hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Prinsip ini mendorong humas untuk tidak hanya berorientasi pada kepentingan institusi, tetapi juga pada kemaslahatan masyarakat luas.

Prinsip keenam adalah fastabiqul khairāt (berlomba dalam kebaikan). Prinsip ini mendorong setiap lembaga untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan prestasinya. Dalam konteks manajemen humas, fastabiqul khairāt diwujudkan dengan memberikan dorongan dan kesempatan kepada seluruh komponen lembaga untuk berinovasi dan berprestasi, serta mengomunikasikan prestasi tersebut kepada publik. Semangat berlomba dalam kebaikan ini menjadi motor penggerak bagi lembaga pendidikan Islam untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.¹⁸

3. Fungsi dan Peran Manajemen Humas dalam Islam

Manajemen humas dalam Islam menjalankan fungsi-fungsi yang secara umum sama dengan fungsi humas konvensional, namun dengan penambahan nuansa nilai-nilai Islam pada setiap fungsinya. Fungsi-fungsi tersebut meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Setiap fungsi ini tidak hanya dipandang sebagai prosedur manajerial, tetapi juga sebagai amal ibadah yang bernilai spiritual. Pendekatan ini menjadikan manajemen humas Islami memiliki karakter yang unik dan berbeda.

Fungsi pertama adalah perencanaan (planning) berbasis nilai Islam. Dalam tahap perencanaan, seorang manajer humas Islami harus memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Perencanaan dilakukan dengan cara mendefinisikan permasalahan yang ada, mengkaji akar masalah, kemudian merancang program kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut

¹⁸ Garuda, "Fastabiqul Khairāt dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2018): 135.

dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Perencanaan yang matang menjadi fondasi bagi keberhasilan seluruh aktivitas kehumasan.

Menurut analisis penulis, kelemahan utama humas di banyak lembaga pendidikan Islam bukan terletak pada kurangnya aktivitas publikasi, melainkan pada belum optimalnya perencanaan strategis. Banyak program kehumasan masih bersifat insidental dan berorientasi pada kegiatan seremonial sehingga belum mampu membangun reputasi jangka panjang. Padahal, dalam perspektif manajemen modern, reputasi dibangun melalui proses yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perencanaan yang sistematis dan berorientasi masa depan menjadi keharusan bagi humas lembaga pendidikan Islam.

Fungsi kedua adalah pengorganisasian (*organizing*) dengan prinsip keadilan. Fungsi pengorganisasian mencakup penyusunan struktur, pembagian tugas, dan alokasi sumber daya secara adil dan profesional. Prinsip keadilan (*'adl*) menjadi landasan, di mana setiap individu ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya. Prinsip keadilan dalam pengorganisasian tidak hanya berkaitan dengan pemerataan tugas, tetapi juga menyangkut penempatan sumber daya manusia berdasarkan kompetensi, integritas, dan kapasitas profesionalnya. Pengorganisasian yang baik akan menciptakan sinergi dan efektivitas kerja yang tinggi.

Dalam praktiknya, masih ditemukan lembaga pendidikan yang menempatkan personel humas berdasarkan kedekatan personal atau pertimbangan nonprofesional, sehingga fungsi komunikasi publik tidak berjalan secara optimal. Padahal, pengorganisasian yang berlandaskan prinsip keadilan akan menciptakan efektivitas kerja, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam perlu menerapkan prinsip *the right person in the right place* sebagai bentuk implementasi nilai keadilan yang diajarkan Islam sekaligus sebagai strategi meningkatkan kinerja kehumasan. Penempatan sumber daya manusia yang tepat menjadi kunci keberhasilan organisasi.

Fungsi ketiga adalah pelaksanaan (*actuating*) dengan akhlak mulia. Pelaksanaan merupakan inti dari kegiatan humas yang paling tampak oleh publik. Dalam perspektif Islam, pelaksanaan harus mencerminkan akhlak mulia dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani. Kegiatan pelaksanaan meliputi produksi dan distribusi informasi, penyelenggaraan acara, penanganan pengaduan masyarakat, serta respons terhadap isu negatif atau krisis. Semua aktivitas ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas

Menurut penulis, keberhasilan pelaksanaan fungsi humas tidak hanya ditentukan oleh banyaknya informasi yang dipublikasikan, tetapi juga oleh kualitas interaksi yang dibangun dengan publik. Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, setiap aktivitas komunikasi harus mencerminkan akhlak mulia sebagai identitas institusi. Sikap responsif terhadap keluhan masyarakat, kesantunan dalam menyampaikan informasi, serta kemampuan mengelola krisis secara bijaksana merupakan indikator nyata keberhasilan humas Islami. Dengan demikian, akhlak tidak hanya menjadi nilai moral yang bersifat normatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun citra positif dan loyalitas masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.

Fungsi keempat adalah pengawasan (controlling) dengan muhasabah. Pengawasan dalam manajemen humas Islami tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi spiritual, yaitu kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap amal perbuatan (muraqabah). Evaluasi dilakukan secara berkala dan hasilnya dijadikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini mendorong terciptanya budaya kerja yang transparan dan akuntabel.

Penulis juga berpendapat bahwa konsep pengawasan dalam manajemen humas Islami memiliki keunggulan dibandingkan pendekatan pengawasan konvensional karena tidak hanya berorientasi pada pencapaian target organisasi, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral individu. Konsep muhasabah dan muraqabah mendorong setiap pelaksana humas untuk melakukan evaluasi diri secara berkelanjutan, bahkan ketika tidak berada dalam pengawasan langsung pimpinan. Dalam era digital yang menuntut transparansi tinggi, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena mampu membangun budaya kerja yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Oleh sebab itu, pengawasan dalam humas Islami tidak sekadar berfungsi sebagai alat kontrol, melainkan juga sebagai sarana pembinaan karakter profesional yang berlandaskan nilai-nilai spiritual.

4. Pengembangan Citra Lembaga Pendidikan Islam

Pengembangan lembaga pendidikan Islam adalah suatu upaya yang sistematis dalam merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan lembaga pendidikan dengan segala aspeknya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien agar seluruh komponen sistem lembaga pendidikan Islam berkembang ke arah yang lebih baik, lebih besar dan lebih sempurna. Upaya pengembangan ini memerlukan keterlibatan seluruh komponen lembaga, termasuk peran humas yang strategis dalam membangun komunikasi

publik. Pengembangan yang berkelanjutan menjadi kunci bagi lembaga pendidikan Islam untuk tetap relevan dan kompetitif.¹⁹

Ada empat cara membentuk citra lembaga pendidikan, yaitu: menciptakan public understanding (persetujuan atau penerimaan), menciptakan public confidence (kepercayaan), menciptakan public support (dukungan), dan menciptakan public corporate (kerjasama antara masyarakat dengan lembaga). Dengan demikian peran dan tugas public relations atau humas merumuskan nilai-nilai penting yang bisa mendekatkan produk hasil kepada masyarakat. Keempat cara ini saling berkaitan dan membentuk siklus yang berkesinambungan dalam membangun citra positif lembaga.

Lembaga pendidikan Islam adalah suatu wadah atau organisasi pendidikan yang sengaja didirikan dengan hasrat dan niat untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam. Muhaimin menjelaskan bahwa lembaga pendidikan Islam bisa dikategorikan sebagai lembaga industri mulia (noble industry) karena mengemban misi ganda, yaitu profit dan sosial. Misi profit yaitu untuk mencapai keuntungan sedangkan misi sosial bertujuan mewariskan dan menginternalisasikan nilai luhur. Misi ini dapat tercapai secara maksimal apabila lembaga pendidikan Islam tersebut memiliki modal human-capital dan sosial-capital yang memadai dan juga memiliki tingkat keefektifan dan keefisiensi yang tinggi.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan pengembangan lembaga pendidikan Islam adalah suatu upaya yang sistematis dalam merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan lembaga pendidikan dengan segala aspeknya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien agar seluruh komponen sistem lembaga pendidikan Islam berkembang ke arah yang lebih baik, lebih besar dan lebih sempurna. Pengembangan ini mencakup seluruh aspek, mulai dari kurikulum, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga tata kelola dan hubungan masyarakat. Keberhasilan pengembangan sangat bergantung pada komitmen dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan.

Penulis memandang bahwa citra lembaga pendidikan Islam pada era kontemporer tidak lagi ditentukan hanya oleh kualitas program pendidikan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan lembaga mengomunikasikan nilai, budaya organisasi, dan keunggulan institusinya kepada masyarakat. Dalam konteks ini, humas berfungsi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan kualitas internal lembaga dengan persepsi publik. Oleh sebab itu, keberhasilan membangun citra tidak cukup dilakukan melalui promosi, tetapi

¹⁹ Muhaimin, *Manajemen Pendidikan Islam: Paradigma Baru* (Jakarta: Kencana, 2011), 78.

harus ditopang oleh kualitas layanan, transparansi pengelolaan, dan konsistensi nilai-nilai Islam dalam praktik kelembagaan sehari-hari. Citra yang dibangun dengan landasan nilai yang kuat akan lebih tahan terhadap berbagai tantangan dan krisis.

5. Aplikasi Konsep Manajemen Humas Islami dalam Lembaga Pendidikan Islam

Konsep-konsep yang telah diuraikan di atas dapat diaplikasikan secara konkret dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, sekolah Islam terpadu, atau perguruan tinggi Islam. Aplikasi konsep ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hubungan lembaga dengan publiknya. Implementasi yang konsisten akan membawa dampak positif bagi citra dan keberlanjutan lembaga.

Aplikasi pertama adalah penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang transparan dan berintegritas. Dalam proses PPDB, humas Islami harus menyampaikan informasi secara jujur dan tidak berlebihan (*overpromising*). Seluruh biaya, persyaratan, jadwal, dan prosedur diumumkan secara terbuka. Tidak boleh ada pungutan liar atau praktik diskriminatif. Transparansi dalam PPDB menjadi cerminan komitmen lembaga terhadap nilai kejujuran dan keadilan yang diajarkan Islam.

Aplikasi kedua adalah membangun hubungan harmonis dengan orang tua/wali murid. Humas harus menjalin komunikasi dua arah yang intens dengan orang tua/wali melalui berbagai saluran dengan mengedepankan qaulan *layyinā* dan qaulan *karīmā*. Prinsip ukhuwah Islamiyah menjadikan hubungan antara sekolah dan orang tua tidak sekadar transaksional, tetapi penuh rasa persaudaraan. Hubungan yang harmonis ini akan menciptakan rasa memiliki dan dukungan yang kuat dari orang tua terhadap lembaga.

Aplikasi ketiga adalah publikasi prestasi dan kegiatan lembaga. Humas berperan mengomunikasikan berbagai prestasi yang diraih dengan tetap menjaga prinsip qaulan *sadīda* (tidak melebih-lebihkan). Hal ini sejalan dengan prinsip *fastabiqul khairāt*, yaitu memotivasi seluruh warga lembaga untuk terus berinovasi. Publikasi prestasi yang jujur dan proporsional akan membangun kredibilitas lembaga di mata masyarakat.

Aplikasi keempat adalah penanganan krisis dan isu negatif. Jika lembaga menghadapi isu negatif, humas harus segera melakukan *tabayyun* dengan mengumpulkan fakta. Setelah itu dilakukan *syūrā* dengan pimpinan, kemudian respons publik diberikan dalam bentuk qaulan *sadīda*. Penanganan krisis yang cepat, tepat, dan transparan akan meminimalkan dampak negatif dan bahkan dapat mengubah krisis menjadi peluang untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Aplikasi kelima adalah pengelolaan media sosial dan website lembaga. Di era digital, humas harus aktif mengelola media sosial. Setiap konten harus melalui verifikasi

(tabayyun) dan disusun dengan bahasa yang qaulan maysūrā (mudah dipahami) serta qaulan balīghā (efektif). Pengelolaan media sosial yang profesional dan islami akan memperluas jangkauan komunikasi lembaga serta memperkuat branding Islami di ruang digital.

6. Tantangan dan Peluang Manajemen Humas Islami di Era Digital

Era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi penerapan manajemen humas Islami. Tantangan utama adalah arus informasi yang sangat cepat dan masif, maraknya berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian, tuntutan transparansi yang tinggi, serta kompetisi konten yang ketat. Tantangan-tantangan ini menuntut humas untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kompetensi, terutama dalam bidang literasi digital dan manajemen krisis.

Peluang yang muncul antara lain jangkauan publik yang lebih luas dengan biaya murah, interaksi dua arah secara real-time, penguatan branding Islami, serta pengukuran reputasi yang lebih akurat melalui tools analitik media sosial. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh humas lembaga pendidikan Islam untuk membangun komunikasi yang lebih efektif dan efisien dengan publiknya. Penguasaan teknologi digital menjadi keharusan bagi humas di era kontemporer.

Penelitian menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang mampu mengintegrasikan prinsip tabayyun dan qaulan sadīda dalam komunikasi digitalnya cenderung lebih dipercaya oleh publik dibandingkan yang tidak. Selain itu, penggunaan gaya komunikasi qaulan layyinā (lemah lembut) dalam merespons kritik di media sosial terbukti meredakan ketegangan dan memperbaiki citra lembaga. Temuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani tetap relevan dan bahkan semakin dibutuhkan di era digital.²⁰

Transformasi digital telah mengubah paradigma kehumasan dari komunikasi satu arah menjadi komunikasi partisipatif dan interaktif. Masyarakat saat ini tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga produsen informasi yang dapat memengaruhi reputasi lembaga melalui media sosial. Kondisi ini menuntut lembaga pendidikan Islam untuk mengembangkan strategi humas digital yang tidak hanya responsif terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip komunikasi Qur'ani seperti qaulan sadīda, qaulan layyinā, dan tabayyun. Strategi humas digital yang islami akan menjadi keunggulan kompetitif bagi lembaga pendidikan Islam di era masyarakat informasi.

²⁰ Syarifudin, "Tabayyun sebagai Etika Komunikasi Islam," 58; Hasibuan et al., "Integrasi Nilai-Nilai Islam," 100.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar manajemen humas dalam Islam merupakan integrasi antara fungsi-fungsi manajemen komunikasi publik dengan nilai-nilai yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup dimensi aqidah, syariah, dan akhlak. Konsep ini secara tegas membedakan humas Islami dari humas konvensional yang cenderung pragmatis dan materialistis, karena humas Islami menempatkan keikhlasan, kejujuran, dan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama, bukan sekadar pencitraan semata. Dengan landasan ini, setiap aktivitas kehumasan tidak hanya berorientasi pada reputasi lembaga, tetapi juga pada nilai-nilai ilahiah yang membawa berkah dan keberlanjutan.

Lebih lanjut, prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan manajemen humas dalam Islam meliputi kejujuran (ṣidq), amanah (amānah), komunikasi yang baik (qaulan sadīda, balīghā, karīmā, layyinā, maysūrā), musyawarah (syūrā), klarifikasi informasi (tabayyun), persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah), serta berlomba dalam kebaikan (fastabiqul khairāt). Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki aplikasi praktis yang kuat dalam setiap tahapan manajemen humas, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Penerapannya secara konsisten terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat reputasi lembaga, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga dan masyarakat.

Dalam konteks lembaga pendidikan Islam, aplikasi konsep ini dapat diwujudkan melalui berbagai strategi seperti penerimaan peserta didik baru yang transparan dan berintegritas, membangun hubungan harmonis dengan orang tua/wali berbasis ukhuwah, publikasi prestasi yang jujur dan tidak berlebihan, penanganan krisis dengan langkah tabayyun dan musyawarah, serta pengelolaan media sosial yang santun dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan kapasitas humas berbasis nilai-nilai Islam menjadi suatu keharusan bagi lembaga pendidikan Islam yang ingin membangun citra yang autentik, berkelanjutan, dan diridhai Allah SWT.

Referensi

- Al-Alusi. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
- Cahyono, M. Dwi. "Islamic Values-Based Integrated Digital Reputation Management Model (IVID-MODEL)." *Jurnal*, tahun tidak disebutkan.
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Garuda. "Fastabiqul Khairāt dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (2018): 130–145.
- Hasibuan, dkk. "Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Manajemen Humas Pendidikan." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 75–102.

- "Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam dalam Pelaksanaan Manajemen Humas Dan Kontribusinya dalam Meningkatkan Reputasi Sekolah (Studi Pada SMK Negeri 2 Palembang)." Garuda - Garba Rujukan Digital. Diakses 16 Mei 2026. <https://garuda.kemdikbud.go.id>.
- Langgulong, Hasan. *Peranan Pendidikan Islam dalam Pembangunan Umat*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1988.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhaimin. *Manajemen Pendidikan Islam: Paradigma Baru*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Munir. *Manajemen Humas Pendidikan Islam: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023.
- Murni. "Konsep Manajemen Humas pada Lembaga Pendidikan Islam." *Jurnal Inteligenzia* 5, no. 1 (2019): 27–40. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/view/4352>.
- Ruslan, Rosadi. *Manajemen Public Relation: Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Setyawan. "Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam dalam Manajemen Hubungan Masyarakat." *Jurnal Komunikasi Islam* 10, no. 2 (2020): 110–145.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1994.
- Soenantoko, M. Adhy. "Implementasi Prinsip-prinsip Komunikasi Islam pada Produk Pemberitaan Humas UIN Walisongo." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2025. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25749/>.
- Syarifudin. "Tabayyun sebagai Etika Komunikasi Islam dalam Menangkal Hoax." *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 5, no. 1 (2019): 40–60.
- Trisnantari, Hikmah Eva, Moh. Gufron, dan Putri Rahayu Ningsih. "Strategic Public Relations to Build Public Trust in Islamic Boarding Schools: A Case Study in Indonesia." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 10, no. 02 (2024): 325–336.
- Wahyudi, Tubagus, dkk. "Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Dakwah dan Pendidikan Islam: Pemanfaatan Media Digital untuk Meningkatkan Citra Institusi KAHFI BBC Motivator School." *Jurnal Hijri* (2025). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/hijri/article/view/27246/>.